



## BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

### PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA

### RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KAJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR (DINFRA) SYARIAH PADA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nomor: B.29005/BPKH/BP/A7.4/09/2022

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) Syariah Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan analisa atas skema investasi yang sesuai dengan produk Manajer Investasi;
2. Menyusun Kajian KIK DINFRA Syariah yang memuat diantaranya *Global & Regional Development* of KIK DINFRA Syariah, *Domestic Market Leader of KIK DINFRA* serta Benefits of REITs (keuangan, legal, dll) dengan topik inti sebagai berikut :
  - a. Profil proyek yang akan menjadi underlying KIK DINFRA Syariah : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN lainnya secara singkat;
  - b. Simulasi KIK DINFRA Syariah dan perbandingannya terhadap Kepemilikan Langsung baik dari sisi imbal hasil, pajak, fee Manajer Investasi, risiko dan mitigasinya, exit strategy, dll.
  - c. Analisa terkait mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap underlying KIK DINFRA Syariah;
  - d. Settlement transaksi serta pelaporan pengelolaan instrumen KIK DINFRA Syariah;
  - e. Aspek-aspek relevan seperti: dukungan regulasi Pemerintah dan lain-lainnya; dan
  - f. Kesimpulan kelayakan investasi KIK DINFRA Syariah.
3. Melakukan paparan atas hasil kajian kepada Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas.
4. Menyampaikan hasil kajian dalam bentuk PDF kepada Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas

Kebutuhan Ahli/Personil Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 2 (dua) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

1. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
  - a. Minimal pendidikan setara Sarjana Strata I (S1);
  - b. Memiliki gelar CFA (*Certified Financial Analyst*);
  - c. Memiliki pengalaman dalam bidang jasa konsultansi keuangan/pasar modal dan/atau

- d. Tenaga ahli memiliki pengalaman menulis buku/jurnal/publikasi ilmiah/riset/kajian kelayakam investasi/analisa investasi terkait dengan keuangan syariah/surat berharga syariah/pasar modal/serta dapat menyertakan bukti pendukung seperti sampul depan, *link* publikasi dan lainnya minimal sebanyak 2 karya tulis.
2. Menyediakan 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
    - a. Minimal pendidikan setara Sarjana Strata I (S1);
    - b. Memiliki pengalaman dalam bidang jasa konsultasi keuangan/pasar modal dan/atau pembuatan feasibility study bisnis/investasi minimum selama 3 tahun

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Memiliki izin usaha sebagai jasa aktivitas konsultasi manajemen dengan kode KBLI 7020.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) set dokumen Kajian KIK DINFRA Syariah Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* [divisi.pengadaan@bpkh.go.id](mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id) paling lambat pada hari **Rabu, 5 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian KIK DINFRA Syariah Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Mengingat [pengadaan.com](http://pengadaan.com) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://pengadaan.com) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

#### **Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Kamis – Rabu, 29 September – 05 Oktober 2022	Kamis, 15.00 WIB	Rabu, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Kamis – Rabu, 29 September – 05 Oktober 2022	Kamis, 15.00 WIB	Rabu, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Kamis – Senin, 06 – 10 Oktober 2022	Kamis, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa – Kamis, 11 – 13 Oktober 2022	Selasa, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Kamis, 14 Oktober 2022	08.00 WIB	17.00 WIB

**Keterangan:**

\*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 September 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B.29005/BPKH/BP/A7.4/09/2022

Tanggal : 29 September 2022

**PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM**

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/ CV/ Koperasi	KAP/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUJK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

#### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.